

BAB III

Keterlibatan Amnesty International dalam Penghentian Proyek DAPL

Pada BAB III, penulis akan menganalisis dampak konstruksi DAPL pada tergerusnya kebudayaan penduduk suku Standing Rock Sioux. Pembangunan DAPL yang memicu banyak kontroversi kemudian menarik perhatian dunia, penulis akan menganalisis keterlibatan masyarakat transnasional dalam upaya menghentikan proyek Dakota Access Pipeline dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan di BAB I.

A. Amnesty Internasional Melakukan *empowerment* pada Komunitas Lokal dalam Pembangunan DAPL

Sungai Missouri adalah tempat yang suci bagi Suku Standing Rock, tidak hanya karena sungai merupakan sumber air minum dan sumber makanan bagi mereka namun sejak ratusan tahun yang lalu sungai adalah tempat mereka melakukan ritual. Komunitas asli Standing Rock, yang bertempat tinggal di North Dakota, telah memprotes mengenai jalur pipa ini selama dua tahun sejak rute ulang dirilis. Selama ini sebagian besar liputan media menggambarkan protes sebagai gerakan lingkungan namun diskusi mengenai agama dan adat jarang disorot. Lebih dari 5.000 tahun yang lalu, penduduk sebuah desa di sepanjang Green River, Kentucky, melakukan ritual yang dinamakan Cult of the Keeper River. Kerangka yang ditemukan di Kentucky menunjukkan bukti adanya pertumbuhan jaringan tulang rawan di tulang telinga pada manusia yang berulang kali terkena air dingin — menunjukkan bahwa mereka kerap melakukan upacara keagamaan di sungai. Hari ini budaya suku asli Amerika di Midwest dan selatan menganggap sungai adalah entitas suci dan lebih dikenal sebagai Long Man atau Long Snake. Bagi Standing Rock, pertarungan pipa Dakota Access Pipeline bukan hanya soal tanah mereka yang hilang namun juga mengenai tradisi keagamaan.

Penggusuran budaya dan komunitas lokal yang berada di jalur DAPL bukanlah sesuatu yang baru bagi para masyarakat asli Indiana. DAPL hanyalah satu dari puluhan contoh penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah federal yang semena-mena dalam memperlakukan suku asli Amerika. Seorang petinggi ET bahkan menyatakan bahwa beberapa studi arkeologi yang dilakukan dengan kantor pelestarian bersejarah negara bagian tidak menemukan adanya benda suci di sepanjang rute. Padahal sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, sungai adalah tempat sucinya, tempat sakral dimana masyarakat Sioux melakukan ritual.

Dalam kasus DAPL, pemerintah menggunakan Nationwide Permit 12¹ sebagai pembenaran dibangunnya jalur pipa ini tanpa melakukan tinjauan yang cukup. Alih-alih memeriksa secara luas dampak yang dimiliki oleh pipa besar di sepanjang rutenya, dengan melihat efek yang besar pada air, kualitas udara, tanah dan spesies hewan atau emisi yang mengubah iklim yang dapat disebabkan oleh pembangunan pipa, Korps hanya menilai pipa besar sebagai serangkaian

¹ Nationwide Permit 12 (NWP) memungkinkan USACE untuk mengizinkan segala "kegiatan yang diperlukan untuk pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, dan penghapusan jalur utilitas dan fasilitas terkait di perairan Amerika Serikat. Asalkan kegiatan tersebut tidak mengakibatkan hilangnya lebih dari 1/2-acre perairan Amerika Serikat untuk setiap satu proyek yang terselesaikan. (Draft Decision Document for NWP 12 on Digital Law, "*Nationwide Permit 12 and Domestic Oil Pipelines*"; <http://digital.law.washington.edu/dspace-law/handle/1773.1/1756>, diakses pada May 2019.)

yang jauh lebih kecil, memecahnya menjadi segmen untuk ditinjau di lokasi air dan lahan basah tertentu.

Sejak menggunakan NWP 12 untuk mengizinkan pembangunan Gulf Coast Pipeline pada 2012, Korps telah mengizinkan beberapa jalur pipa utama lainnya dengan izin yang sama. Misalnya seperti, empat kantor distrik Korps telah memberikan perijinan pada jalur pipa minyak di South Flanagan sepanjang 600 mil yang melalui 1.950 saluran air di empat negara bagian di bawah NWP 12, tanpa pemberitahuan publik atau ulasan NEPA atau CWA khusus proyek.² Sedangkan baru-baru ini, Korps telah memverifikasi 1.168 mil Dakota Access Pipeline melalui North Dakota, South Dakota, Iowa, dan Illinois menggunakan NWP 12 juga tanpa tinjauan risiko yang memadai. Contoh-contoh tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan NWP 12 yang seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghancurkan situs-situs bersejarah. Para pemerhati lingkungan seperti Sierra Club, National Wildlife Federation mengatakan bahwa NWP tidak pernah dimaksudkan untuk mengotorisasi mempengaruhi proyek-proyek infrastruktur pipa besar-besaran dan bahwa izin otoritas seharusnya tidak ada lagi. Sebagai gantinya, mereka berpendapat bahwa agen-agen federal harus diminta untuk mengeluarkan Clean Water Act 404 dan tinjauan lingkungan yang lebih luas di bawah Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional (NEPA). Mereka berpendapat bahwa, NWP 12 dan ketentuan-ketentuannya memungkinkan persetujuan jaringan pipa utama tanpa peninjauan lingkungan khusus proyek atau proses peninjauan publik, seharusnya dihapuskan atas pertimbangan dari berbagai kasus pembangunan infrastruktur yang sudah terjadi.

² Sierra Club v. Bostick, Plaintiffs' Motion for Summary Judgment, dilampirkan sebagai Exhibit 1.

Sioux Treaty pertama kali dibuat pada tahun 1851, salah satu isinya memberikan 12.500.000 hektar tanah untuk masyarakat adat. Hingga pada tahun 1910, pemerintah federal berturut-turut melanggar empat perjanjian dan saat ini hanya tersisa 640.000 hektar tanah reservasi. Sejak tahun 1940-1970-an pembangunan infrastruktur secara masif membuat keberadaan penduduk pribumi semakin tergeser. Yang lebih disayangkan lagi, sering kali pembangunan menargetkan penggusuran tanah (milik masyarakat adat) dan tempat-tempat suci mereka. Dua tanah reservasi terbesar di North Dakota dipilih sebagai reservoir dengan Garrison Dam mengaliri 153.000 hektar properti suku asli Indiana, sementara Lake Oahe mengaliri 200.000 hektar tanah Standing Rock Sioux Reservation. Banyak keluarga (dari masyarakat adat) yang kehilangan rumah, sekolah, dan infrastruktur dibiarkan begitu saja tanpa jalan, air yang mengalir maupun makanan. Mereka terus menunggu kompensasi layak dari pemerintah yang tidak kunjung diberikan. Salah satu akademisi terkenal di Amerika, Vine Deloria Jr yang berasal dari Standing Rock mengatakan bahwa program pembangunan bendungan itu adalah satu-satunya tindakan yang paling merusak yang pernah diabadikan pada suku apapun oleh Amerika Serikat.

Seluruh pembangunan infrastruktur memerlukan persetujuan oleh USACE yang harus melewati *National Historic Preservation Act* (NHPA). Disahkan menjadi undang-undang pada tahun 1966, NHPA disahkan setelah Perang Dunia II, ketika masa depan Amerika mengancam masa lalunya yang tak tergantikan. Perluasan infrastruktur Amerika seperti jalan raya, bendungan, jaringan listrik dengan cepat menghancurkan situs arkeologi kuno, kuburan dan bangunan bersejarah. Dengan NHPA, Kongres menyatakan bahwa pelestarian warisan bersama Amerika adalah untuk kepentingan umum. Pertikaian antara penduduk asli Amerika di Dakota Utara dan pengembang proyek pipa minyak dan pasukan polisi telah menginspirasi protes di seluruh negeri.

Saat mempertimbangkan upaya baru, sejumlah efek pada properti bersejarah harus dipertimbangkan: *direct* (seperti perusakan fisik), *indirect*, jangka pendek, jangka panjang, atau kumulatif (seperti bagaimana satu pipa mungkin tidak membahayakan sebuah situs, tetapi mungkin selusin dari mereka bisa membahayakan). NHPA tidak menjamin pelestarian. Tapi Undang-Undang ini mensyaratkan bahwa pembuat keputusan harus menyeimbangkan kepentingan Amerika dalam pembangunan dengan kebutuhan untuk menghormati sejarah asli mereka.

Selama bertahun-tahun, penduduk asli Amerika hanya memiliki sedikit peluang untuk menyampaikan opininya pada proyek-proyek pembangunan besar seperti DAPL. Tetapi pada tahun 1992, Kongres mengubah NHPA untuk secara resmi memasukkan properti budaya tradisional. Ini adalah tempat-tempat yang, karena hubungannya dengan praktik budaya asli Amerika atau kepercayaan komunitas yang hidup, "berakar dalam sejarah komunitas itu" dan "pentingnya menjaga identitas budaya komunitas yang berkelanjutan." Amandemen tersebut mengarahkan badan-badan federal, dalam melaksanakan tanggung jawab mereka di bawah NHPA, untuk berkonsultasi dengan suku-suku Indiana yang mementingkan agama dan budaya di tempat-tempat suci ini. Sehingga pemerintah federal dan suku-suku Indiana sebagai penduduk asli Amerika dapat memajukan Amerika dengan seimbang.

Masyarakat adat sudah secara terbuka membicarakan mengenai situs sejarah dan sakral milik, namun Standing Rock terus di-*frame* oleh media sebagai protes lingkungan atau alternatif untuk Occupy Wall Street. Sebagai upaya untuk didengar, komunitas penduduk asli Amerika meluncurkan platform media seperti Indian Country Media Network, membuat video YouTube serta film dokumenter berdurasi panjang mengenai Oceti Sakawin, dan menggunakan platform media sosial untuk menjangkau publik. Namun demikian,

karena kurangnya media diskusi internasional tentang agama asli, masyarakat kurang memahami dan bagaimana pipa berdampak pada tempat-tempat suci mereka. Lagi-lagi, budaya masyarakat adat tergerus karena pembangunan infrastruktur. Penargetan nasional tempat-tempat keagamaan, bersama dengan pembantaian (Pembantaian Whitestone Hill, yang menewaskan lebih banyak warga sipil daripada Wounded Knee, terjadi di sebelah timur Standing Rock), pemindahan paksa dan pendidikan ulang (juga secara paksa) bagi anak-anak komunitas adat telah membuat masyarakat adat tidak lagi memercayai pemerintah. Ketika saluran pipa dialihkan dari Bismarck, diikuti oleh pengabaian penilaian pelestarian lingkungan dan sejarah yang diamanatkan, masyarakat adat merasa Korps Angkatan Darat mengulangi tindakan-tindakan saat proyek bendungan bendungan dijalankan beberapa tahun silam.

Pada BAB I, penelitian ini berargumen bahwa Amnesty International merupakan organisasi dengan tipe *empowerment at the grassroots* yang dikemukakan oleh Phillip Eldridge dimana NGO dengan tipe ini bekerja sebagai penggerak masyarakat agar memperjuangkan hak-haknya sendiri. Selain itu, AI juga kerap menjadi organisasi berperan sebagai “suara” bagi masyarakat yang tidak didengar oleh pemerintah. Dalam kasus DAPL, riset yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Amnesty International telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan proyek ini. AI telah memobilisasi ribuan orang untuk memanggil pejabat lokal dari negara bagian untuk menuntut agar mereka melindungi hak asasi setiap orang. AI juga meminta pemerintah federal untuk menghentikan proyek DAPL dan menyelidiki klaim kepolisian yang menyudutkan pihak masyarakat adat. Salah satunya dengan mengirimkan surat-surat kepada para petinggi pemerintah. Mulai dari mengirimkan surat terbuka kepada pemerintah lokal Morton County Sheriff United States, hingga kepada pemerintah

federal *United States Department of Justice* dan presiden Barack Obama. Amnesty menunjukkan kekhawatirannya kepada berbagai pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian pada proses pembangunan DAPL serta bagaimana pembangunan ini sendiri adalah suatu pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang telah ditetapkan pada perjanjian Fort Laramie tahun 1868. Penelitian ini menunjukkan bahwa AI, sebagai *mobilization NGO* berpihak sebagai penggerak antara pihak Standing Rock Sioux dan pemerintah AS.

B. Amnesty Internasional membangun Solidaritas Masyarakat Transnasional

B.1 Isu DAPL menjadi Isu Internasional

Protes pertama kali dilakukan pada bulan April 2016, dimana puluhan masyarakat (dari beberapa suku) menunggangi kuda untuk memprotes pembangunan pipa DAPL yang dilakukan tanpa berkonsultasi dengan pihak adat. Seminggu kemudian, mereka mendirikan "*sacred camps*" di jalur saluran pipa yang diusulkan akan melintasi sungai Missouri. Para anggota suku berencana untuk tinggal dan memprotes hingga waktu yang tidak ditentukan. Grup ini terdiri dari anggota negara Standing Rock serta yang lain dari negara-negara Dakota Utara dan Selatan, termasuk Cheyenne River Lakota dan Rosebud Sioux.³ Para anggota suku Tribal bergabung bersama dalam rangka memblokir pembangunan jalur pipa. Doug Crow Ghost, juru bicara Standing Rock Sioux sekaligus direktur dari Kantor Perairan Tribal meminta

³ The Guardian, "*Native American tribes mobilize against proposed North Dakota oil pipeline*", <https://www.theguardian.com/us-news/2016/apr/01/native-american-north-dakota-oil-pipeline-protest>, diakses pada July 2019.

dukungan dari seluruh negara untuk melawan pembangunan ini bersama karena pembangunan jalur pipa ini ilegal dan jelas melanggar isi Perjanjian *Fort Laramie*. Beberapa bagian jalur pipa DAPL mulai dibangun perlahan sebulan setelahnya pada bulan Mei.

Jan Hasselman, seorang pengacara *Earth Justice* yang mewakili *Standing Rock Sioux*, mengambil tindakan hukum pertama mereka untuk memblokir pipa ke Kejaksaan Resmi Kolombia pada awal bulan Juli 2016. Mereka secara resmi mengajukan keluhan terhadap Korps Insinyur Angkatan Darat A.S. atas perizinan yang diberikan kepada Dakota Access untuk melanjutkan pembangunan jalur pipa. Mereka juga meminta supaya pembangunan diberhentikan sementara sampai ada keputusan resmi dari kejaksaan. Suku Standing Rock mengajukan surat resmi kepada Kejaksaan Kolombia karena aturan-aturan perizinan yang dikeluarkan oleh USACE melanggar *Clean Water Act* (CWA) dan *National Environmental Policy Act* (NEPA) 42 U.S.C. §4321⁴. Suku

⁴ *National Environmental Policy Act* (NEPA) adalah undang-undang yang dibuat pada tahun 1969 dan merupakan salah satu undang-undang pertama yang dibuat oleh pemerintah federal Amerika Serikat. yang menetapkan kerangka kerja nasional untuk melindungi lingkungan. Kebijakan dasar NEPA adalah untuk memastikan bahwa semua cabang pemerintahan memberikan pertimbangan yang tepat kepada lingkungan sebelum melakukan tindakan federal yang dapat mempengaruhi lingkungan secara signifikan. Persyaratan NEPA digunakan ketika bandara, bangunan, kompleks militer, jalan raya, dan pembangunan infrastruktur lainnya diusulkan. Sementara *Environmental Assessment* (EA) atau penilaian lingkungan dan *Environmental Impact Statement* (EIS) merupakan penilaian terhadap kemungkinan dampak dari tindakan yang akan dilakukan. Keduanya adalah

Standing Rock Sioux memaparkan keberatan atas pembangunan ini secara formal pada *Complaint for Declaratory and Injunctive Relieve* yang langsung ditujukan kepada *United States Army Corps of Engineers* (USACE). Salah satu poin dalam surat tersebut adalah kekhawatiran suku Standing Rock akan terjadinya kebocoran minyak. Rute DAPL melewati Sungai Missouri yang merupakan sumber air utama milik suku Standing Rock yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Organisasi Iowa Chapter, yang merupakan bagian dari Sierra Club, mengkhawatirkan akan dampak yang terjadi jika pipa bocor. Minyak yang mudah terbakar sangat mungkin merusak pertanian dan lingkungan yang berada di sekitar jalur pipa, seperti; mencemari sungai, danau dan sumber-sumber air di Iowa, menghancurkan tanah pertanian Iowa, dan merusak margasatwa beserta habitatnya. Seperti kecelakaan-kecelakaan kebocoran pipa yang sudah terjadi sebelumnya di negara bagian lainnya.

Menanggapi hal itu, beberapa minggu kemudian pada bulan Juli, muncul kamp-kamp besar lainnya, yang didirikan oleh beragam suku tribal bahkan hingga pendukung non-adat muncul di dekat kamp yang didirikan pada bulan April lalu. Kamp utama, berisikan lebih dari 1.000 pendukung dari representasi ratusan negara Tribal, dinamakan sebagai Oceti Sakowin yang berarti “Seven Council Fires”. Suku-suku tersebut datang untuk mendukung Standing Rock, menjadikan protes ini salah satu protes terbesar dalam sejarah Masyarakat Tribal setelah Battle at Little Big Horn tahun 1876. Kamp-kamp Standing Rock semuanya terletak sekitar satu jam di selatan Bismarck, North Dakota. Aksi ini merupakan aksi *grassroots* pertama kali yang dilakukan oleh para masyarakat Tribal.

persyaratan NEPA yang paling penting dan harus dilakukan oleh semua badan federal.

Kasus ini mengekskalasi sekitar bulan Agustus saat David Archambault II, pemimpin dari suku Standing Rock Sioux serta beberapa tokoh *native* dan *non-native* ditangkap. Kemudian pada bulan September, pengadilan distrik Distrik Columbia mengumumkan bahwa mereka menolak permintaan penghentian darurat oleh masyarakat Standing Rock, dan mencatat bahwa USACE tidak berkewajiban untuk melakukan tinjauan lingkungan terhadap seluruh pipa karena sebagian besar dibangun di tanah pribadi mereka. Kemudian pada hari itu, *U.S. Justice and Interior Departments and Army* memerintahkan Korps untuk menghentikan pembangunan di dekat Danau Oahe sampai penilaian lingkungan lebih lanjut dilakukan.

Para demonstran telah berulang kali menekankan bahwa mereka berniat tetap tidak bersenjata dan melakukan demo secara damai. Ketika saluran pipa semakin dekat ke sungai Missouri, para aktivis telah berusaha untuk mendirikan kemah dan lingkaran doa di properti tempat pembangunan direncanakan. Para pemimpin pemuda sering berada di garis depan dan langsung berselisihan dengan polisi, menghadapi peluru karet, *pepper spray*, meriam air dan ancaman lain dari penegak hukum. Ancaman-ancaman kepada para demonstran tidak berakhir disitu, sejumlah anjing polisi pun dilepas untuk membubarkan massa yang menutup rute pembangunan pipa.

Aparat penegak hukum menangkap 141 orang pada bulan Oktober 2016 di Dakota Utara setelah polisi mengepung para pengunjuk rasa, mengerahkan semprotan merica dan kendaraan lapis baja untuk membersihkan ratusan aktivis dan pendukung penduduk asli Amerika dari tanah yang dimiliki oleh perusahaan pipa minyak. Langkah ini menandai dimulainya fase baru yang agresif dalam upaya polisi yang sedang berlangsung untuk menggagalkan demonstrasi selama berbulan-bulan oleh ratusan anggota lebih dari 90 suku asli Amerika untuk mencegah pembangunan jaringan pipa Dakota Access yang kontroversial, yang mereka katakan akan

mengancam persediaan air dan hancurkan situs suci pada wilayah tersebut.

Saksi mata mengatakan, petugas keamanan swasta melepaskan semprotan merica dan pit bull pada kerumunan pria, wanita, dan beberapa anak-anak yang memprotes saluran pipa selama akhir pekan. Tetapi pihak berwenang setempat mengatakan para demonstran menjadi agresif, hampir membuat pekerja dan keamanan kewalahan di lokasi pembangunan. Kantor Sheriff Kabupaten Morton mengatakan kepada ABC News bahwa tiga pekerja terluka oleh pengunjuk rasa; pejabat suku melaporkan bahwa 30 pemrotes dipukul dengan semprotan merica dan 12 lainnya digigit anjing polisi. Lebih dari 200 petugas polisi menanggapi demonstrasi, banyak menggunakan semprotan merica dan menembakkan kacang tas pada pengunjuk rasa. Mereka menggunakan perangkat akustik jarak jauh dengan nada tinggi untuk membubarkan kerumunan. Sementara itu, Humvee dan bus berkeliaran di tempat kejadian ketika dua helikopter dan sebuah pesawat memindai operasi dari udara. Pihak berwenang mengatakan bahwa eskalasi dari aktivis yang membangun perkemahan di tanah pribadi, membuat mereka tidak punya pilihan selain campur tangan. Konfrontasi tersebut menandai konflik paling intens pada protes pembangunan jalur pipa DAPL saat ini, yang telah menjadi titik terang bagi Amerika Serikat untuk hak-hak penduduk asli Amerika dan aktivisme perubahan iklim.

Dunia internasional mulai melihat bahwa apa yang terjadi pada suku Standing Rock Sioux bukan lagi permasalahan domestik Amerika Serikat namun sudah menjadi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Menyikapi hal ini, *United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues* pada 31 Agustus menyatakan dukungan mereka terhadap suku Standing Rock Sioux. Mereka menyatakan bahwa Standing Rock Sioux harus memiliki suara dalam proyek apapun yang menyangkut teritori mereka, dalam kasus

ini adalah Sungai Missouri dan Lake Oahe. UNPFII juga memberikan pertanyaan bagaimana "kegagalan untuk berkonsultasi dengan Sioux mengenai proyek tersebut melanggar Deklarasi AS tentang *U.N. Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*." Dalam pernyataan lainnya UNPFII mengatakan;

“Bagi masyarakat adat, lingkungan adalah entitas hidup yang mengandung sumber-sumber kehidupan kita serta situs suci dan warisan kita. Lingkungan adalah bagian penting dari kehidupan kita dan segala ancaman terhadapnya berdampak pada keluarga, leluhur, dan generasi masa depan kita. Oleh karena itu sangat penting bahwa Amerika Serikat menghormati dan mengakui hak intrinsik dari Sioux dan tradisi spiritual mereka, sejarah, filosofi, dan terutama hak mereka atas tanah dan wilayah mereka. Dunia menyaksikan apa yang terjadi di Dakota Utara.”⁵

Sejumlah artis-artis Hollywood juga ikut memberikan opini mereka terhadap kasus DAPL, seperti Leonardo Di Caprio, Ben Affleck, Ray Fisher, Gal Gadot, Jason Momoa, dan Ezra Miller — bintang film *Justice League* — mengunggah video atas dukungan mereka untuk Respect Our Water, sebuah kampanye yang diluncurkan oleh anggota muda Standing Rock Sioux Tribe. Suara mereka di sosial media dengan tagar #StandWithStandingRock, yang memiliki jutaan pengikut turut membantu kasus DAPL semakin menjadi sorotan dunia internasional. Sejumlah artis lainnya seperti Shailene Woodley, Riley Keough dan Susan Sarandon, bahkan bergabung dengan anggota Standing Rock Tribe di

⁵ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *North Dakota: “Indigenous peoples must be consulted prior to oil pipeline construction”*, <https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20570>, diakses pada July 2019.

gedung pengadilan di Washington, D.C. Agustus lalu untuk melakukan protes.

Bukan hanya *United Nations* dan artis Hollywood, sejumlah organisasi HAM lebih cepat turun tangan dalam menyuarakan kegelisahan mereka mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak ET atas suku Standing Rock dan demonstran damai. Banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Energy Transfers seperti penggunaan senjata terhadap demonstran, pembungkaman media terhadap kasus DAPL, serta yang paling mendasar adalah pelanggaran hak untuk mendapat kehidupan yang layak bagi penduduk Standing Rock membuat organisasi-organisasi HAM makin lantang menyuarakan penindasan yang mereka lakukan. Human Rights Watch, Amnesty International, EarthJustice! dan sejumlah aktivis lainnya turut melakukan penolakan dengan membuat kampanye, petisi hingga terjun langsung ke kamp untuk melihat kondisi para pemrotes.

Sejak bulan Agustus tahun 2016, Amnesty International memulai *campaign* serta melakukan upaya-upaya untuk mendukung para suku Standing Rock Sioux dengan membuat berbagai pers rilis dan petisi. Dalam kampanyenya, AI menekankan bahwa apa yang dilakukan oleh polisi merupakan suatu pelanggaran HAM. Amerika Serikat dalam amandemennya yang pertama mengatakan bahwa setiap warga negara Amerika Serikat memiliki hak untuk berbicara (*freedom of speech*) sehingga pembungkaman yang dilakukan para polisi merupakan suatu pelanggaran HAM. Selain itu, bagi suku Standing Rock Sioux mendapatkan air serta kehidupan yang layak adalah hal yang diatur oleh *Universal Declaration of Human Rights*, maka jika pembangunan pipa ini dilanjutkan pemerintah AS melanggar hal tersebut. Dari kampanye-kampanye yang dilakukan AI, kemudian muncul tagar #NoDAPL yang mendukung suku Standing Rock di sosial media.

Protes #NoDAPL bersifat monumental dalam menggambarkan kekuatan gerakan sosial dan hubungannya dengan pemerintah. Dengan kemajuan teknologi, jumlah orang yang mendukung Standing Rock Sioux solidaritas menjadi sangat besar. Hampir 1,4 juta orang mendaftar petisi di Facebook Standing Rock dalam upaya untuk menekan polisi. Para pengunjung rasa percaya "menggunakan fitur lokasi Facebook untuk menyusun daftar aktivis" dapat memberikan tekanan pada pemerintah maupun kepolisian untuk segera menghentikan pembangunan proyek DAPL. Dibawah spanduk tagar #NoDAPL dan #StandWithStandingRock, aksi unjuk rasa diselenggarakan dari San Francisco, tempat lebih dari 5.000 orang berkumpul di Balai Kota, ke St. Paul, Minnesota, tempat 1.000 orang berkumpul di kantor Korps Angkatan Darat, dan New York serta Washington DC di mana 2.000 dan 3.000 orang menunjukkan masing-masing.

B.2 Kekuatan Amnesty International dalam Penghentian DAPL

Penangkapan demonstran, yang melabel diri mereka sebagai “*water protectors*”, telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir dan penegakan hukum telah menggunakan tanggapan yang lebih militeristik terhadap protes dan perkemahan di dekat lokasi konstruksi Pipa Akses Dakota. Masyarakat adat setempat mengatakan saluran pipa membahayakan pasokan air mereka dan menodai tanah suci. Minggu ini, penangkapan terjadi di sebuah kamp yang baru-baru ini didirikan di tanah pribadi yang *federally-recognized* yang berada didekat lokasi konstruksi.

Sejak awal kasus ini muncul, Amnesty International USA (AIUSA) telah mengamati bagaimana pembangunan pipa DAPL akan berjalan. Amnesty Internasional pada bulan Agustus 2016 memutuskan untuk menerjunkan beberapa delegasi pengamat hak asasi manusia untuk terjun langsung ke

Standing Rock Sioux dan memantau respon polisi terhadap demo yang dilakukan oleh para demonstran. Sejak protes berlangsung, AI juga telah mendokumentasikan banyak contoh penyalahgunaan kekuatan yang berlebihan dan intimidasi oleh polisi serta tuduhan kriminal pada demonstran.

Amnesty International sebagai organisasi internasional yang berfokus pada mengkampanyekan HAM telah memiliki cabang di 120 negara dan lebih dari 7 juta pendukung, seringkali dianggap sebagai organisasi yang memiliki kekuatan politik besar. Karena anggapan tersebut, pembahasan mengenai Amnesty International tidak terlepas dari kekuatan organisasi ini terhadap isu-isu HAM dunia.

Kekuasaan atau kekuatan produktif (*productive power*) adalah salah satu taksonomi kekuasaan yang diperkenalkan oleh Barnett dan Duvall. Barnett dan Duvall memberikan definisi kekuasaan sebagai berikut, "*Power is the production, in and through social relations, of effects on actors that shape their capacity to control their fate.*" Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua dimensi analitis yang penting. Dimensi analitis pertama menyangkut tentang jenis-jenis relasi sosial dimana kekuasaan bekerja. Terdapat dua bentuk relasi sosial dalam dimensi ini yaitu hubungan "interaksi" antar aktor yang telah terbentuk sebelumnya dan hubungan "konstitutif" sebagai aktor dalam kehidupan sosial. Sedangkan dimensi analitis yang kedua menyangkut tentang perbedaan relasi sosial dari "interaksi" atau "konstitutif" dimana kekuasaan bekerja, secara langsung dan spesifik, atau tidak langsung dan tersebar.

Perbedaan-perbedaan yang dihasilkan oleh dimensi analitis tersebut kemudian menghasilkan taksonomi kekuasaan meliputi: *compulsory, institutional, structural, dan productive*;

Tabel 3.1

Taksonomi Kekuasaan (Power) Barnett dan Duvall

		Relational specificity	
		Direct	Diffuse
Power works Through	Interaction of specific actors	Compulsory	Institutional
	Social Relations of Constitution	Structural	Productive

Sumber: Barnett, M., & Duvall, R. (Eds.). (2005a). *Power in Global Governance*. Cambridge: Cambridge University Press.

Kekuasaan produktif terjadi karena proses sosial yang konstitutif dan tidak terjadi karena proses interaksi antar aktor. Kekuasaan produktif merupakan kekuasaan yang bekerja melalui pembentukan keseluruhan subjek sosial dengan berbagai kuasa sosial yang dilakukan dengan sistem pengetahuan dan praktik- praktik diskursif yang mencakup jangkauan sosial yang luas. Dengan demikian, kekuasaan produktif melihat bahwa kapasitas sosial pada aktor diproduksi melalui proses sosial yang konstitutif yang kemudian membentuk pemahaman dan kepentingan para aktor.

Kekuasaan produktif menekankan pentingnya diskursus, proses sosial dan sistem pengetahuan dimana hal tersebut dihasilkan, ditetapkan, dihidupi, dirasakan, dan ditransformasikan dalam kehidupan sosial kekuasaan produktif, diskursus adalah bentuk dari relasi sosial dari kekuasaan karena hal tersebut terjadi dalam kehidupan sosial. Proses dan praktik diskursif tersebut juga menghasilkan identitas dan kapasitas sosial. Proses dan praktik tersebut memberikan makna kepada identitas dan kapasitas sosial. Hal tersebut pada akhirnya bermuara pada asimetri kapasitas

sosial yang dimiliki oleh aktor internasional.⁶

Karena proses diskursus yang terbentuk secara sosial tersebut, tidak jarang ditemukan bahwa Amnesty International harus memikul tanggung jawab tertentu, seperti harus membantu korban pelanggaran HAM dan menyuarakan pelanggaran tersebut agar menjadi sebuah isu internasional, meskipun pada dasarnya tanggung jawab tersebut bukan hanya diberikan kepada AI saja. Namun, karena proses sosial dan praktik diskursif tersebut menyebabkan pembentukan identitas dan pembedaan kapasitas sosial aktor sehingga menempatkan Amnesty International dalam tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, kekuasaan produktif bekerja menghasilkan identitas tertentu bagi Amnesty International sebagai organisasi dengan kekuatan politik yang bertanggung jawab atas kasus-kasus pelanggaran HAM.

Pada kasus ini, Amnesty telah mengirimkan surat-surat kepada Divisi Patroli North Dakota dan kantor Morton County Sheriff yang berisikan AIUSA meminta agar penghalang jalan ke lokasi protes dilepaskan, mendesak pihak berwenang untuk bertemu secara teratur dengan pengunjuk rasa dan pemimpin masyarakat, dan mengingatkan para pejabat tugas mereka untuk memfasilitasi protes damai. Selain itu, surat juga telah dilayang kepada Gubernur Republik Doug Burgum dan Jaksa Agung Wayne Stenehjem untuk membatalkan atau mempertimbangkan dakwaan yang jatuh pada demonstran tertangkap. Surat itu juga meminta mereka untuk meninjau praktik polisi dan membuka penyelidikan independen terhadap beberapa kasus. Polisi mengatakan

⁶ Barnett, Michael and Raymond Duvall, 2005. "Power in Global Governance." *Power in Global Governance*, edited by Michael Barnett and Raymond Duvall, Cambridge: Cambridge University Press.

bahwa beberapa pemrotes ikut andil dalam kerusuhan serta melakukan kekerasan, maka polisi melakukan hal yang sama sebagai *act of self-defense*.

Sementara itu, AI juga telah memobilisasi ribuan orang untuk memanggil pejabat lokal dari negara bagian untuk menuntut agar mereka melindungi hak asasi setiap orang. AI juga meminta pemerintah federal untuk menghentikan proyek DAPL dan menyelidiki klaim kepolisian yang menyudutkan pihak masyarakat adat. Amnesty International memiliki *background* yang kuat dalam memastikan jalannya pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya selalu patuh pada standar hak asasi manusia internasional yang sesuai dengan UDHR. Kampanye dan petisi penolakan pembangun jalur pipa DAPL juga dilakukan secara masif oleh AI. Setelah mengirim delegasi pengamat hak asasi manusia untuk memantau kondisi protes, Amnesty International USA hari ini meminta pemerintah negara bagian dan lokal untuk mengambil langkah-langkah spesifik guna melindungi hak masyarakat adat untuk memprotes secara damai di lokasi pipa yang disengketakan di Dakota Utara.

Merespon surat yang telah dikirim langsung oleh Amnesty International kepada presiden berisikan urgensi untuk menghentikan konstruksi dan bagaimana pemerintah telah melanggar beberapa Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh dunia internasional, akhirnya pemerintahan Obama merespon pada 14 Desember 2016. Korps Insinyur Angkatan Darat akan menghentikan pembangunan Pipa Akses Dakota di bawah Sungai Missouri di dekat Reservasi Standing Rock Sioux sampai keputusan final tinjauan lingkungan dikeluarkan. Hal ini adalah kemenangan sementara bagi suku asli Indiana dan aktivis-aktivis yang andil dalam protesnya.

Pemberhentian sementara untuk merute ulang jalur pipa merupakan salah satu contoh kekuasaan yang dimiliki oleh Amnesty International dalam pembentukan *discourse*. AI

menggunakan kekuatannya sebagai organisasi HAM internasional yang selalu menyuarakan perihal ini dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan HAM. Melalui kampanye-kampanye serta petisi yang dilakukan oleh AI pada situs web organisasi dan sosial medianya, AI berhasil membentuk sebuah wacana bahwa sedang terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh perusahaan Energi Transfers pada suku Standing Rock Sioux. Air dan kehidupan yang layak merupakan hak semua manusia dan perusahaan ini mengambil hak itu.

Penulis menyatakan bahwa lebih banyak humanitarianisme daripada idealisasi dan citra proyek dalam suatu pembentukan wacana. Amnesty International lebih proaktif dalam memobilisasi sumber daya secara kolektif dan memaksimalkan penggunaan pada media untuk membentuk agenda. Kekuasaan AI dibentuk melalui hubungan sosial secara global, proses sosial yang secara struktural dibentuk dan diproduksi secara diskursif yang memungkinkan Amnesty International berperilaku hegemon.

C. Implikasi Tekanan INGO terhadap Proyek DAPL

Organisasi *Amnesty Internasional* adalah salah satu dari banyak organisasi HAM yang ikut turun tangan dalam penolakan pembangunan *Dakota Access Pipeline* ini. Berada dalam visi yang sama untuk membantu suku *Standing Rock Sioux*, *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, sejumlah organisasi lingkungan seperti *Greenpeace International* dan *Earth Justice*, *Sierra Club*, serta para selebriti Hollywood terkemuka seperti Rosario Dawson dan Shailene Woodley terjun ke lapangan untuk mengikuti aksi damai yang dipimpin oleh suku Standing Rock. Para selebriti lain seperti Mark Ruffalo dan Susan Sarandon yang tidak mengikuti aksi damai pun turut menyuarakan penolakan mereka terhadap DAPL dengan tagar #NoDAPL dan #StandWithStandingRock sebagai bentuk solidaritas dan dukungan mereka. Masyarakat

dari berbagai kalangan turut menyatakan posisi mereka dalam pembangunan DAPL ini di sosial media dengan berbagai bentuk, seperti cuitan di Twitter, unggahan di Facebook, melakukan penggalangan dana untuk suku Standing Rock serta melalui petisi yang dibuat di sejumlah situs web seperti change.org.

Kasus yang awalnya bermula dari menjaga air yang berada di sekitar jalur pipa telah meluas menjadi permasalahan hak asasi manusia. Perusahaan ET dan perusahaan terkait lainnya secara agresif menggunakan undang-undang AS untuk menyita properti pribadi di semua proyek pipa utama saat ini. Selain itu, Water Protectors dan masyarakat lain yang menentang DAPL menghadapi tekanan yang berlebihan, penangkapan sewenang-wenang dan tuntutan hukum. Lebih dari setengah dari seluruh suku asli Amerika di AS telah berjanji untuk mendukung Sioux hingga akhir, dan sejumlah anggota Kongres telah menulis surat yang mendesak pemerintah Obama untuk turun tangan dan menghentikan pipa. Pada bulan November 2016, Oxfam Novib, Greenpeace, dan Friends of the Earth meminta bank internasional untuk mencabut investasi mereka pada pipa DAPL. NGOs ini menunjukkan bahwa proyek tersebut bertentangan dengan komitmen mereka (bank) terhadap *Equator Principles*.⁷

⁷ Equator Principles (EPs) adalah kerangka kerja manajemen risiko, yang diadopsi oleh lembaga keuangan, untuk menentukan, menilai dan mengelola risiko lingkungan dan risiko sosial dalam suatu proyek yang dimaksudkan untuk memberikan standar minimum pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab. EP berlaku secara global, untuk semua sektor industri dan untuk empat produk keuangan, yaitu; Project Finance Advisory Services, Project Finance, Project-Related Finance, dan Bridge Loans. (Equator

Sepanjang protes, beberapa individu dan kelompok non-suku asli bergabung dalam solidaritas dengan Suku Sioux. Sebanyak 2.000 veteran bergabung dengan demonstrasi di Standing Rock. Beberapa selebritis terlibat dalam protes termasuk Mark Ruffalo, "yang menyediakan infrastruktur untuk kamp, termasuk panel surya" dan Shailene Woodley yang ditangkap oleh polisi North Dakota karena dituduh melakukan pelanggaran hukum pidana.

Pada bulan Desember, setelah mendapatkan banyak tekanan dari berbagai pihak, Presiden Obama menolak untuk memberikan izin yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek sebagai dukungan terhadap masyarakat Tribal yang telah menunjukkan penolakan mereka dengan melakukan demonstrasi yang masif dan terstruktur. Pada titik ini, ETP sangat meremehkan kekuatan protes terhadap proyek DAPL. Kelompok-kelompok pribumi dan aktivis di seluruh dunia terus meminta bank, pemerintah kota, dan individu untuk menarik pendanaan untuk jaringan pipa lainnya yang sedang dikembangkan oleh ETP. Mengingat tumpahan yang telah terjadi pada pipa-pipa sebelumnya, tumpahan pipa DAPL bukan lagi permasalahan "jika terjadi" tapi "akan terjadi". Lembaga perlindungan lingkungan memperketat peraturan yang mengatur izin untuk pembangunan pipa. Terjadi titik balik dan kemenangan sementara bagi para pendukung Standing Rock Sioux yang telah melakukan protes selama berbulan-bulan dengan berbagai cara.

Kendati skala para pemrotes yang besar serta dukungan dari dunia internasional untuk menghentikan proyek Dakota Access Pipeline, pada Januari 2017 hanya 4 hari setelah terpilih, Presiden Donald Trump menandatangani

Principles, "The Equator Principles; About", <https://equator-principles.com/about/>, diakses pada July 2019.)

perintah eksekutif dalam rangka mendukung pembangunan jalur pipa tersebut. Presiden Trump “menandatangani tindakan eksekutif yang memungkinkan pembangunan pipa minyak Keystone XL dan Dakota Access untuk bergerak maju,” dengan mempercepat “tinjauan lingkungan komprehensif dari pipa akses Dakota”. Pada akhir masa pemerintahannya Obama memerintahkan tinjauan lingkungan yang komprehensif untuk pipa Dakota Access sebelum bagian terakhirnya dapat dibangun. Korps Insinyur Angkatan Darat juga sepekat untuk mencari rute alternatif. Tetapi, *president-elect* Trump mengatakan dia ingin mempercepat ulasan lingkungan seperti itu.

“Prosesnya sangat panjang dan rumit sehingga mereka menyerah sebelum akhir. Terkadang butuh bertahun-tahun dan kami tidak ingin itu terjadi, ” kata Trump.

Dilansir dari Associated Press (AP), pada tahun 2016 lalu, Trump memiliki saham kecil di Energy Transfer Partners dan US\$100,000 di Phillips 66, sebuah perusahaan energi yang memiliki tempat terpisah dari pipa Dakota. Seorang juru bicara mengatakan kepada AP bahwa Trump menjual saham tahun lalu sebagai bagian dari "divestasi saham luas." Selain Trump, setidaknya ada dua kandidat yang berada dalam struktur pemerintah yang mungkin dapat mengambil manfaat dari pembangunan pipa. Miliarder minyak Harold Hamm dapat mengirimkan minyak dari perusahaannya, Continental Resources, melalui pipa, sementara mantan Gubernur Texas Rick Perry melayani sebagai dewan direksi dari Energy Transfer Partners.

Terjadinya perbedaan kepentingan antara pemerintahan Amerika Serikat dan golongan oposisinya disini terlihat sangat jelas. Terlepas dari pemerintah yang pro-DAPL, mayoritas pengunjung rasa dan jurnalis tetap teguh mendukung Standing Rock Sioux Tribe. Yang paling menonjol dari protes #NoDAPL ini adalah kekuatan gerakan

sosial, dan kemampuannya untuk memobilisasi ribuan orang menuju tujuan bersama. Pada puncak protes, hampir 10.000 orang secara fisik hadir di kamp-kamp protes di Standing Rock. Berdasarkan ahli sejarah dari Universitas Arizona Donald Fixico, protes ini merupakan sejarah pertemuan terbesar suku suku asli Amerika dalam satu abad setelah Perang di Little Big Horn.

Sangat disayangkan walau begitu besar tekanan dari dalam maupun luar negeri, tekanan dari banyaknya organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil, pembangunan DAPL tetap dilanjutkan dan hingga skripsi ini diterbitkan masih aktif mengangkut minyak.